

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA  
YANG DI PHK SECARA SEPIHAK ATAS  
TUDUHAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
TANPA PROSES PIDANA**

**(STUDI KASUS PUTUSAN No. 925K /Pdt.Sus-PHI /2016)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Yos Aprialdi**

**201410115226**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Di PHK  
Secara Sepihak Atas Tuduhan Melakakukan Tindak  
Pidana Tanpa Proses Pidana  
(Studi Kasus Nomor 925 K/ Pdt.Sus.PHI/2016)

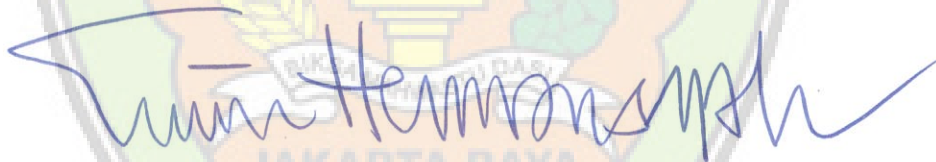
Nama Mahasiswa : Yos Aprialdi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115226

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 24 Juli 2018

MENYETUJUI,  
Dekan,



**Dr.H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H**

NIP. 1804338

Pembimbing I



**Anggreany Haryani Putri, SH., MH**

NIP. 011506039

Pembimbing II



**Sugeng, SH., MH**

NIP. 011611058

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Di PHK Secara  
Sepihak Atas Tudingan Melakukan Tindak Pidana Tanpa Proses  
Pidana  
(Studi Kasus Nomor 925 K/ Pdt.Sus.PHI/2016)

Nama Mahasiswa : Yos Aprialdi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115226

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 24 Juli 2018

Pembimbing I



Anggreany Haryani Putri, SH., MH.

NIP. 011506039

Pembimbing II



Sugeng, SH., MH.

NIP. 011611058



## LEMBAR PENGESAHAN

**Judul Skripsi** : **Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Di PHK Secara Sepihak Atas Tuduhan Melakukan Tindak Pidana Tanpa Proses Pidana (Studi Kasus Nomor 925 K/Pdt.Sus.PHI/2016)**

**Nama Mahasiswa** : **Yos Aprialdi**

**Nomor Pokok Mahasiswa** : **201410115226**

**Program Studi/ Fakultas** : **Ilmu Hukum/Hukum**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi** : **20 Juli 2018**

**Bekasi, 27 Juli 2018**

**MENGESAHKAN,**

**Ketua Penguji**

**: Sri Wahyuni, S.H., M.H  
NIP. 1504117**

**Penguji I**

**: Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si  
NIP. 1712304**

**Penguji II**

**: Gatot Efrianto, S.H., M.H  
NIP. 0704118**

**MENGETAHUI,**

**Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum**

**Dekan  
Fakultas Hukum**



**Elfirda Ade Putri, SH.,MH.  
NIP 011512043**



**Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH.,MH  
NIP 1804338**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul :

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Di PHK Secara Sepihak Atas Tuduhan Melakukan Pidana Tanpa Proses Pidana (Studi kasus putusan Nomor 925 /Pdt.SUS-PHI/2016)

Ini adalah hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya sudah dituliskan secara jelas dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikan melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 30 Juli 2018

Yang membuat pernyataan.



Yos Aprialdi

201410115226

v

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yos Aprialdi  
NPM/NIP : 201410115226  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakulta : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DI PHK SECARA SEPIHAK ATAS TUDUHAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA PROSES PIDANA (Studi Kasus Putusan Nomor 925 K/Pdt.SUS-PHI-2016)**

.beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*data base*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : BEKASI

Pada tanggal : 30 Juli 2018

Yang menyatakan,

  
( Yos Aprialdi )

## ABSTRAK

**Yos Aprialdi, 201410115226, Skripsi, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Di PHK Secara Sepihak Atas Tuduhan Melakukan Tindak Pidana Tanpa Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 925 K/Pdt.Sus-PHI/2016)**

**Kata Kunci :** Pemutusan Hubungan Kerja tanpa proses Pidana.

Dalam dunia ketenagakerjaan berbagai konflik antara Pengusaha dan Pekerja selalu saja terjadi, salah satunya adalah konflik atau Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang merupakan konflik laten dalam hubungan antara pengusaha dan pekerja. Konflik tersebut dapat dihindari jika Pengusaha atau Pekerja/Buruh tidak melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang menjadi dasar Pengusaha dan Pekerja dalam menjalankan Hubungan Industrial guna melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan memahami mekanisme dan bentuk-bentuk perlindungan hak-hak pekerja setelah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena tuduhan melakukan Tindak Pidana yang belum diproses Putusan Pidana, di PT. GLOBAL DISPOMEDIKA berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih lemah terutama kelemahan dari segi muatan pasalnya maupun pengaturan pengenaan sanksi yang belum diatur dalam perundang-undangan. Faktanya peraturan maupun penegak hukum di bidang ketenagakerjaan belum dapat melindungi pekerja yang dituduh melakukan tindak pidana, majelis hakim memutus berdasarkan aturan yang tidak sesuai dengan aturan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dengan menjatuhkan putusan pemutusan hubungan kerja kepada Mamluhatun Hikmah. Kesimpulan Penjatuhan putusan tersebut sangat merugikan pekerja yang tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, seharusnya putusan dapat menjalankan amanat undang-undang bukan hanya berdasarkan keyakinan hakim saja, Oleh karena itu harus ada upaya dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengamandemen Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pasal yang oleh Mahkamah Konstitusi sudah diputus tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga kepastian hukum dapat terwujud.

Pembimbing

Anggreany Haryani Putri, SH., MH.

Sugeng, SH., MH.

## **ABSTRACT**

**Yos Aprialdi, 201410115226. Scription.** *Legal Protection Against Workers Terminating Employment Relations (PHK) on Accusations of Criminal Acts that have not been processed Criminal Decision (Case Study Decision Number 925 K/Pdt.SUS-PHI/2016).*

*Keywords: Termination of Employment, which has not been the Criminal Decision process*

*In the world of employment various conflicts between employers and workers always occur, one of which is conflict or Termination Dispute (PHK) which is a latent conflict in the relationship between employers and workers. Such conflicts may be avoided if the Employer or Worker / Laborer does not violate the Law No.13 of 2003 on employment, Work Agreement (PK), Company Regulation (PP), and Collective Labour Agreement (PKB) under which the Employer and Worker in running the Industrial Relations to protect the rights and obligations of both parties. This research was conducted to know and understand the mechanism and forms of protection of workers' rights after Termination of Employment (PHK) due to Allegations of Criminal Acts that have not been processed Criminal Decision, in PT. GLOBAL DISPOMEDIKA based on law No.13 of 2003 on Manpower and Decision of Constitutional Court No.012 /PPU-12 /2003 and Circular Letter of Minister of Work and Transmigration No. T12. 13 / men / SJ-HK / I / 2005. Based on the results of the research, it is found that the application of Law No.13 of 2003 on Manpower is still weak, especially weakness in the terms of the content of the article and the setting of imposition of sanctions that have not been regulated in legislation. In fact, law and law enforcement in the field of labor has not been able to protect workers accused of crime, the judges decided on the basis of the rules that are not in accordance with the rules in the Manpower Act by dropping the decision termination of employment to Mamluhatun Hikmah. (The conclusion) The imposition of such verdict is very detrimental to workers who do not meet the sense of justice and legal certainty, the decision should be able to carry out the mandate of the law not only based on the judge's conviction, therefore there must be efforts from the Government and the House of Representatives to amend Act No. 13 of 2003 on Manpower, especially articles that the Constitutional Court has decided does not have binding legal force, so that legal certainty can be realized.*

*Advisor :*

*AnggreanyHaryaniPutri, SH.,MH.*

*Sugeng, SH., MH.*



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH.SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menulidapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulisan skripsi ini penulis memilih judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Di PHK Secara Sepihak Atas Tuduhan Melakukan Tindak Pidana Tanpa Proses Pidana”. (Studi Kasus Putusan Nomor 925 K/ Pdt.SUS-PHI/2016)”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih dari jauh harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-bainya.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Irjen Pol (Purn) Drs. Bambang Karsono, S.H.,M.M., Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah., S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A., Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.

4. Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Yonedi dan Ibunda Dewi Murni, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memeberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan.

Ibu Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Sugeng, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.

5. Kawan-kawan seperjuangan di Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.
6. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, semangat serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini, semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala oleh Allah SWT.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 30 Juli 2018



**Yos Aprialdi**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>JUDUL SKRIPSI</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNGESAHAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	v
<b>LEMBAR PUBLIKASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>MOTTO PERSEMBAHAN</b> .....	xv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah.....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Peneletian dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penetian.....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	8

1.4	Kerangka Teoritis,Konseptual,Pemikiran.....	8
1.4.1	Kerangka Teoritis.....	8
1.4.2	Kerangka Konseptual.....	9
1.4.3	Kerangka Pemikiran.....	11
1.5	Metode Penelitian.....	12
1.5.1	Tipe Penelitian.....	12
1.5.2	Pendekatan Penelitian.....	12
1.6	Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>		<b>15</b>
2.1	Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum, Teori Keadilan,Teori Kepastian Hukum.....	15
2.1.1	Konsep Perlindungan Hukum.....	15
2.1.2	Teori Keadilan.....	17
2.1.3	Kepastian Hukum.....	19
2.2	Hubungan Kerja.....	21
2.2.1	Pemutusan Hubungan Kerja.....	25
2.3	Jenis Pemutusan Hubungan Kerja.....	29
2.4	Hubungan Industrial.....	34
2.4.1	Peraturan Perusahaan.....	35
2.4.2	Peraturan Kerja Bersama.....	37
2.4.3	Perselisihan Hubungan Industrial.....	40
2.4.4	Mahkamah Konstitusi.....	42

**BAB III HASIL PENELETIAN.....48**

- 3.1 Apakah Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus Perkara Nomor 925 K/Pdt.SUS-PHI/2016 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No: 12/PPU-I/2003
- 3.2 Apakah Pemutusan Hubungan Kerja terhadap buruh/pekerja yang diduga melakukan tindak pidana tanpa melalui proses Hukum Pidana pada Putusan Nomor 925 K/Pdt.SUS-PHI/2016 sudah memenuhi Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum bagi pekerja

**BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELETIAN.....100**

- 4.1 Apakah Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus Perkara Nomor 925 K/Pdt.SUS-PHI/2016 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No: 12/PPU-I/2003
- 4.2 Apakah Pemutusan Hubungan Kerja terhadap buruh/pekerja yang diduga melakukan tindak pidana tanpa melalui proses Hukum Pidana pada Putusan Nomor 925 K/Pdt.SUS-PHI/2016 sudah memenuhi Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum bagi pekerja

**BAB V PENUTUP.....139**

- 5.1 Kesimpulan.....139
- 5.2 Saran.....139

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

## MOTTO

“KEBAHAGIAAN hidup itu harus terus dinikmati. Apapun yang kita miliki, jangan pernah iri dengan orang lain. BERUSAHALAH copy kehebetan orang lain. Selama iri kita tidak akan BAHAGIA”

(Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.H)

*“If you don't give up, you still have a chance And, when you are small, you have to be very focused and rely on your brain, not you strength”*

(Jak Ma)

*“Try not become a man of success, but rather try to become a man of value”*

(Albert Einstein)

## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT  
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,

Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Bapak Yonedi dan Mamaku Dewi Murni yang

Senantiasa berdoa berkorban

Dan mendukungku Terima kasih untuk semua kasih sayang

Dan cinta Sehingga aku bisa mendapatkan

Gelar sarjanaku ini

Adik ku :

Rizki Alfideri dan Arahman Ramadhan

Yang selalu memberikan motivasi, doa dan semangat untukku

Seluruh keluarga besar Bapak dan Mamaku terima kasih atas doa,

Nasehat dan dukungannya

Almamater tercinta

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Semoga Allah SWT selalu memberikan karunia dan nikmat yang tiada  
henti untuk kita semua. (Aamiin)

## DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Kerterangan
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PHI	Perselisihan Hubungan Industrial
BW	Burgerlijk Wetboek

